

PROVINSI – PEMBENTUKAN

2022

UU NO. 14, LN 2022/NO. 157, 15 HLM. TLN NO. 6803, 5 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN

- ABSTRAK** : - Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Guna mencapai cita-cita dan tujuan NKRI serta mempercepat pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan Orang Asli Papua di wilayah disebut di atas maka perlu untuk membentuk undang-undang Tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diberi otonomi khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Turut diatur mengenai kabupaten-kabupaten yang menjadi cakupan wilayahnya. Kabupaten-kabupaten dimaksud adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Diatur tentang batas-batas wilayah provinsi, kewajiban pemerintah provinsi terkait rencana tata ruang wilayah, Ibu Kota Provinsi, Pemerintah Daerah/perangkat/aparat dan aset daerah dan dukungan APBN dan APBD Papua terkait pendanaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan.
- CATATAN** : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan Tanggal 25 Juli 2022;
- Peraturan pelaksana undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan;
 - Peraturan pelaksana dari undang-undang ini secara jenis dan hierarki menyesuaikan dengan peraturan oerundang-undangan yang berlaku dalam Otonomi khusus;
 - Penjelasan 5 hlm.
 - Lampiran 2 hlm.